

LAHAN PERTANIAN, TENAGA KERJA DAN SUMBER PENDAPATAN DI BEBERAPA PEDESAAN JAWA BARAT

Oleh:

Memed Gunawan dan Ikin Sadikin

Abstrak

Belakangan ini struktur perekonomian masyarakat pedesaan Jawa Barat telah mengalami perubahan, dimana peran sektor pertanian memperlihatkan kecenderungan yang terus menurun. Sejalan dengan itu sektor non pertanian telah mulai dirasakan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi kelangsungan hidup keluarga petani. Penelitian ini telah mengungkapkan, bahwa baik petani tuna lahan, petani berlahan sempit, maupun petani berlahan luas, baik di daerah berlahan sawah, berlahan marginal, maupun daerah sayuran/ternak, semuanya melibatkan diri dalam kegiatan usaha non pertanian. Luas lahan pertanian mempunyai hubungan yang kuat dan nyata terhadap tingkat pencurahan kerja dan pendapatan petani, dimana setiap pertambahan luas lahan sebesar 1 persen, maka tingkat pencurahan kerja keluarga meningkat sekitar 1,2 persen dan tingkat pendapatan bertambah hampir 2 persen. Suatu hal menarik dari penelitian ini adalah rumah tangga petani di daerah sayuran atau peternakan memperlihatkan tingkat produktivitas kerja lebih tinggi daripada di daerah padi, baik daerah padi lahan sawah, maupun daerah padi lahan kering. Sehingga dengan demikian tingkat pendapatan petani di daerah sayuran/peternakan tersebut secara nyata lebih tinggi daripada di kedua daerah lainnya.

PENDAHULUAN

Pola penggunaan tenaga kerja dan struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan pada umumnya masih terkait erat pada lahan pertanian dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lahan pertanian tersebut. Dengan semakin berkurangnya lahan pertanian di Jawa relatif terhadap ketersediaan tenaga kerja di pedesaan, sektor non pertanian semakin berkembang dan pertanian semakin mengarah kepada kegiatan yang hemat lahan dan intensif. Perbedaan keadaan sumberdaya lahan menentukan jenis komoditas yang diusahakan, dan pada gilirannya juga menentukan kegiatan di sektor non pertanian yang berkaitan dengan komoditas tersebut.

Tulisan ini akan mengetengahkan masalah ketenagakerjaan dan pendapatan di beberapa tipe pedesaan yang dibedakan menurut keadaan sumberdaya lahan. Secara rinci tujuan tulisan ini adalah: (1) mengetahui perbedaan dalam pola pencurahan dan sumber tenaga kerja, (2) mengetahui

perbedaan tingkat dan struktur pendapatan, (3) mempelajari perilaku masyarakat pedesaan dalam penyediaan tenaga kerja di sektor pertanian dan non pertanian, dan (4) mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat pedesaan.

METODA PENELITIAN

a. Data

Data yang digunakan adalah data Patanas di Jawa Barat. Sebanyak 6 desa contoh yang dipilih secara sengaja (purposive) yang dikelompokkan menurut keadaan irigasi dan komoditas yang diusahakan, yaitu desa persawahan dataran rendah (tipe I), yang terdiri dari desa-desa Lakbok, Sampalan dan Rajasinga; desa persawahan dataran tinggi (tipe II), yaitu desa Sodong dan Nagrak, dan desa tanah kering dataran tinggi (tipe III), yaitu desa Margamukti. Komoditas utama yang dikembangkan di masing-masing tipe desa tersebut ada-

lah padi dataran rendah, padi dataran tinggi, sayuran dan peternakan. Dari tiap desa ditarik contoh secara acak sebanyak 60 rumah tangga. Untuk melihat pengaruh ukuran lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga terhadap pola pencurahan tenaga kerja dan tingkat serta struktur pendapatan, rumah tangga contoh dikelompokkan berdasarkan luas pemilikan lahan menjadi kelompok I sampai dengan IV, dengan luasan masing-masing 0 ha (tuna lahan), 0,001–0,250 ha; 0,251–0,500 ha dan >0,500 ha.

b. Model Analisis

Analisis akan menggunakan metoda tabulasi sederhana untuk menerangkan pola penggunaan tenaga kerja dan struktur pendapatan secara deskriptif. Selain itu fungsi regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh beberapa peubah yang dihipotesiskan mempengaruhi pendapatan dan ketersediaan tenaga kerja keluarga.

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA

Karakteristik rumah tangga di tiga tipe desa dan kelompok luas lahan milik diperlihatkan pada Tabel 1. Angkatan kerja rumah tangga didefinisikan

sebagai anggota rumah tangga yang berumur antara 10 dan 60 tahun, pekerja adalah anggota rumah tangga yang termasuk angkatan kerja dan sudah bekerja dan memperoleh pendapatan, dan tanggungan adalah anggota keluarga yang tidak bekerja. Di desa tipe sawah jumlah anggota keluarga dan angkatan kerja keluarga maupun jumlah pekerja lebih kecil dibandingkan dengan di daerah ternak dan sayuran. Demikian juga pendidikan mereka lebih rendah, dengan rata-rata 3,3 tahun pada desa tipe I dan 3,8 tahun di desa tipe II. Di desa tipe III rata-rata pendidikan adalah 7 tahun. Jumlah anggota keluarga umur balita dan jumlah tanggungan per pekerja juga lebih tinggi di desa tipe ternak dan sayuran. Tingkat partisipasi kerja di daerah penghasil padi lebih tinggi dari pada di daerah penghasil sayuran dan ternak. Kalau dibandingkan antar kelompok luas lahan milik, terlihat bahwa jumlah total anggota keluarga, anggota keluarga yang sudah mencapai usia kerja dan jumlah tanggungan lebih besar dengan semakin luasnya lahan milik. Ini berarti anggota keluarga berlahan luas banyak yang tidak bekerja walaupun sudah usia kerja. Kemungkinan mereka tidak masuk dalam angkatan kerja karena masih sekolah sehingga masih tetap jadi tanggungan orang tuanya. Rumah tangga yang mempunyai lahan luas menyekolahkan anaknya relatif lebih tinggi, sehingga

Tabel 1. Rataan jumlah anggota keluarga, angkatan kerja, anak balita dan jumlah tanggungan pada berbagai kelompok petani di daerah pedesaan Jawa Barat, 1988.

Kelompok petani		Anggota keluarga (orang)	Umur KK (thn)	Pendidikan KK (thn)	Angkatan Kerja (orang)	Jumlah Pekerja (orang)	Anak Balita (orang)	Jml tanggungan (orang)
Desa dataran rendah:								
Gurem	162	4,01	39,08	2,34	2,94	2,08	0,64	2,05
Kecil	106	4,16	40,23	3,53	2,98	2,18	0,62	2,07
Sedang	94	4,49	42,34	3,68	3,39	2,21	0,61	2,27
Tinggi	95	4,39	46,13	4,47	3,48	2,00	0,44	2,42
Total	457	4,22	41,48	3,33	3,16	2,11	0,59	2,18
Desa dataran tinggi:								
Gurem	137	4,23	40,18	3,63	2,89	1,55	0,75	2,97
Kecil	90	3,88	49,50	3,78	3,01	1,66	0,39	2,60
Sedang	30	4,30	48,63	4,23	3,20	1,50	0,50	3,20
Tinggi	43	5,12	50,86	3,95	4,28	1,58	0,42	3,72
Total	300	4,26	45,35	3,78	3,16	1,58	0,57	2,99
Desa lahan kering:								
Gurem	56	4,86	38,29	6,54	3,27	1,52	0,91	3,66
Kecil	53	5,40	42,58	7,08	4,08	1,62	0,64	3,68
Sedang	18	6,00	49,61	6,11	4,67	2,17	0,83	3,81
Tinggi	23	6,83	45,81	7,91	5,26	1,57	0,65	5,42
Total	150	5,49	42,33	6,89	4,03	1,64	0,77	3,96

mereka mempunyai kesempatan lebih tinggi pula dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang menghasilkan produktivitas kerja tinggi.

Secara rata-rata, luas lahan pertanian yang dimiliki tidak menunjukkan perbedaan yang menyolok antar tipe desa, kecuali pada kelompok rumah tangga berlahan >0.5 ha, yaitu masing-masing 1,27; 1,60; dan 2,27 ha, masing-masing di desa tipe I, II dan III.

PENGUASAAN ASET DAN SUMBER PENDAPATAN

Di pedesaan penguasaan faktor produksi umumnya berarti penguasaan lahan pertanian. Khususnya di Jawa, pengertian lahan pertanian biasanya lebih sempit lagi, yaitu sawah. Secara garis besar penguasaan faktor produksi dapat diklasifikasikan menjadi pemilik lahan dan non pemilik lahan atau buruh tani, yang tingkat ketergantungannya pada lahan pertanian sangat tinggi, baik dari segi kesempatan kerja maupun pendapatan.

Distribusi penguasaan lahan di Jawa Barat termasuk menceng berat (Saleh dkk., 1988). Artinya terdapat sekelompok masyarakat yang menguasai lahan pertanian, dan sebagian yang hanya mempunyai tenaga kerja. Saleh dkk. menunjukkan Gini Ratio yang tinggi di semua tipe desa, yaitu 0,585; 0,463 dan 0,750 masing-masing di daerah padi dataran rendah, padi dataran tinggi dan sayuran dan ternak dataran tinggi. Untuk masing-masing tipe desa luas rata-rata usahatani adalah 0,44; 0,52 dan 1,36 (Tabel 2).

Rumah tangga tuna lahan di tiap tipe desa masing-masing adalah 19,5 persen, 28,7 persen dan 25,3 persen, tetapi yang menyatakan bahwa sumber

pendapatan utamanya dari berburuh tani kurang dari 7 persen. Selain itu, walaupun data pemilikan lahan menunjukkan bahwa 75 – 80 persen memiliki lahan pertanian, hanya sekitar 45 persen yang menyatakan sumber pendapatan utamanya dari sektor pertanian. Di daerah penghasil sayuran dan ternak walaupun 75 persen rumah tangga memiliki lahan pertanian, tetapi hanya 39 persen yang berpendapatan utama dari sektor pertanian. Ini suatu pertanda bahwa keterikatan mereka pada lahan pertanian tidaklah besar. Sektor non pertanian telah menjadikan sumber pendapatan penting bagi semua kelompok masyarakat pedesaan di desa contoh.

Sumber usaha non pertanian terpenting adalah perdagangan dan jasa, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi sekitar 35 persen masyarakat pedesaan. Persentase rumah tangga di sektor industri sangat kecil, mungkin karena selain memerlukan modal besar dan keterampilan khusus sehingga tidak banyak kesempatan penduduk pedesaan untuk berusaha di bidang ini.

TINGKAT PENCURAHAN TENAGA KERJA

Perbedaan Antar Tipe Desa

Alokasi tenaga kerja masyarakat pedesaan pada berbagai sumber pendapatan dimungkinkan karena tersedianya alternatif kesempatan kerja pada berbagai bidang, terutama sektor non pertanian. Kegiatan di sektor non pertanian tidak terlepas dari jenis komoditi pertanian yang diusahakan petani. Beberapa komoditi pertanian mempunyai kaitan dengan sektor agro industri yang luas, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan komoditi ini dapat

Tabel 2. Luas pemilikan dan garapan di tiap tipe desa, menurut kelompok luas milik, Jawa Barat, 1988.

Luas garapan	Kelompok luas milik (ha)			
	I	II	III	IV
Desa tipe I				
Luas milik	0	0,13	0,38	1,27
Luas garapan	0,24	0,22	0,37	0,73
Desa tipe II				
Luas milik	0	0,13	0,39	1,60
Luas garapan	0,17	0,16	0,38	0,90
Desa tipe III				
Luas milik	0	0,10	0,40	2,27
Luas garapan	0,36	0,10	0,76	2,47

menciptakan kegiatan lain pada sektor non pertanian.

Tabel 3 – 5 menyajikan pencurahan kerja pada kegiatan pertanian dan non pertanian. Penggunaan tenaga kerja keluarga di daerah padi dataran tinggi jauh lebih kecil dibandingkan dengan di dua tipe desa lainnya walaupun luas lahan milik di ketiga tipe desa hampir tidak berbeda. Perbedaan yang mencolok terlihat pada kegiatan berburuh tani, dagang dan industri. Secara total pencurahan tenaga keluarga pada desa tipe III adalah yang paling tinggi (sekitar 2000 jam/rumah tangga), dibandingkan dengan desa tipe I (sekitar 1500 jam/rumah tangga), dan tipe II (kurang dari 1000 jam/rumah tangga).

Tanaman sayuran menggunakan tenaga kerja dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan pada tanaman padi. Rata-rata jam kerja per hektar yang digunakan untuk tanaman sayuran adalah 2546 jam sedangkan untuk tanaman padi adalah 1216 jam di dataran rendah dan 1313 jam di dataran tinggi. Usahatani sayuran adalah usahatani yang lebih intensif dalam penggunaan tenaga kerja terutama dalam pemeliharaan tanaman. Ini yang menyebabkan tingginya penggunaan tenaga kerja keluarga di daerah sayuran.

Perbedaan menyolok terlihat pada curahan tenaga kerja untuk kolam dan ternak, yaitu sekitar 600 jam di daerah sayuran, sedangkan hanya sekitar 50 jam di daerah padi. Berbeda dengan

Tabel 3. Distribusi pencurahan tenagakerja RT pada berbagai sektor di pedesaan Jawa Barat berdasarkan luas pemilikan tanah di desa padi dataran rendah, 1987/1988.

Jenis kegiatan	Luas pemilikan tanah (ha)							
	0		0–0.25		0.25–0.50		0.50	
	DK	LK	DK	LK	DK	LK	DK	LK
 Jam kerja/musim							
1. Pertanian :	263	131	430	98	396	236	293	381
– Usahatani	48	131	189	98	208	236	165	381
– Peternakan & kolam	13	0	15	0	30	0	31	0
– Kebun & pekarangan	0	0	11	0	23	0	42	0
– Berburuh	202	0	215	0	135	0	55	0
2. Non pertanian :	1176	0	1140	0	988	0	1061	0
– Dagang dan Industri	995	0	905	0	705	0	867	0
– Pegawai dan Jasa	144	0	139	0	239	0	174	0
– Berburuh	37	0	96	0	44	0	20	0
Total	1439	131	1570	98	1384	236	1354	381

Tabel 4. Distribusi pencurahan tenagakerja RT pada berbagai sektor di pedesaan Jawa Barat berdasarkan luas pemilikan tanah di desa padi dataran tinggi, 1987/1988.

Jenis kegiatan	Luas pemilikan tanah (ha)							
	0		0.50		0–0.25		0.25–0.50	
	DK	LK	DK	LK	DK	LK	DK	LK
 Jam kerja/musim							
1. Pertanian :	185	89	260	105	221	257	278	705
– Usahatani	75	89	111	105	110	257	124	705
– Peternakan & kolam	24	0	89	0	90	0	127	0
– Kebun & pekarangan	8	0	5	0	14	0	27	0
– Berburuh	78	0	55	0	7	0	0	0
2. Non pertanian :	621	0	474	0	319	0	348	0
– Dagang dan Industri	300	0	248	0	252	0	113	0
– Pegawai dan Jasa	231	0	164	0	63	0	148	0
– Berburuh	90	0	62	0	4	0	87	0
Total (1 + 2)	806	89	735	105	540	257	626	705

Tabel 5. Distribusi pencurahan tenagakerja RT pada berbagai sektor di pedesaan Jawa Barat berdasarkan luas pemilikan tanah di desa sayuran/ternak dataran tinggi, 1987/1988.

Jenis kegiatan	Luas pemilikan tanah (ha)							
	0		0-0.25		0.25-0.50		0.50	
	DK	LK	DK	LK	DK	LK	DK	LK
 Jam kerja/musim							
1. Pertanian :	740	343	894	186	819	1133	1078	5394
- Usahatani	11	343	155	186	192	1133	211	5394
- Peternakan & kolam	417	0	576	0	612	0	867	0
- Kebun & pekarangan	0	0	1	0	15	0	0	0
- Berburuh	312	0	162	0	0	0	0	0
2. Non pertanian :	835	0	1046	0	455	0	777	0
- Dagang dan Industri	289	0	552	0	326	0	461	0
- Pegawai dan Jasa	370	0	494	0	129	0	316	0
- Berburuh	176	0	0	0	0	0	0	0
Total	1575	343	1940	186	1274	1133	1855	5394

usahatani lahan, kolam dan ternak tidak menggunakan tenaga luar keluarga. Hal ini akan memberikan kegiatan bagi tenaga keluarga sepanjang tahun, karena kolam dan ternak bukan usaha musiman.

Pencurahan tenaga kerja di sektor non pertanian di dataran rendah secara rata-rata sekitar 1100 jam per rumah tangga, sedangkan di dataran tinggi sekitar 400 jam di daerah padi dan 700 jam di daerah sayuran/ternak. Angka-angka tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan pencurahan kerja di sektor pertanian. Ini adalah petunjuk bahwa kegiatan non pertanian di pedesaan sangat penting. Di daerah padi dataran rendah alokasi tenaga kerja keluarga di sektor pertanian hanya 30 persen dari total pencurahan kerja keluarga, sedangkan di daerah padi dataran tinggi dan sayuran/ternak masing-masing adalah sekitar 50 persen.

Perbedaan Menurut Kelompok Rumah Tangga

Rata-rata pencurahan tenaga kerja keluarga antar kelompok rumah tangga pada usahatani lahan berkorelasi positif dengan luas lahan yang dimilikinya. Sebaliknya pencurahan tenaga kerja berburuh tani berkorelasi negatif dengan lahan yang dimiliki. Secara keseluruhan perbedaan antar kelompok dalam pencurahan kerja untuk sektor pertanian tidak banyak, akan tetapi kelompok rumah tangga tuna lahan dan berlahan kecil lebih banyak berburuh, sedangkan pemilik lahan luas sebaliknya lebih banyak bekerja pada lahan pertaniannya. Di semua tipe desa kegiatan berburuh tani terutama dilakukan oleh rumah tangga yang tidak memiliki lahan atau lahan yang dimiliki kecil. Rumah tangga

pemilik lahan kurang dari 0,25 ha mencurahan tenaga di sektor pertanian terutama untuk berburuh tani. Secara rata-rata hampir 50 persen tenaga di sektor pertanian dari kelompok ini adalah untuk berburuh tani. Pemilik lahan lebih dari 0,25 ha hanya sedikit mencurahan tenaga untuk berburuh.

Rumah tangga di dataran rendah menggunakan antara 18 – 56 persen tenaga keluarga mereka untuk usahatani padi, sedangkan di daerah padi dataran tinggi antara 41 – 50 persen. Pencurahan kerja di daerah sayuran dan ternak paling banyak adalah untuk pekarangan, peternakan dan perikanan, yaitu antara 58 – 82 persen. Bagi kelompok rumah tangga I dan II, keterlibatan mereka dalam sektor pertanian terutama untuk berburuh tani. Pada kelompok ini pencurahan tenaga untuk pertanian hanya sekitar 18 dan 23 persen di daerah padi. Di daerah sayuran kelompok ini mencurahan tenaga cukup banyak untuk berburuh tani. Mungkin karena kegiatan usahatani sayuran dan ternak tidak bersifat musiman seperti pada usahatani padi. Pemeliharaan tanaman, misalnya, dilakukan secara terus menerus dan sangat intensif dalam penggunaan tenaga kerja.

Hal lain yang menarik adalah kegiatan peternakan, kolam, kebun, pekarangan dan usaha non pertanian tidak menggunakan tenaga kerja upahan. Distribusi pencurahan kerja sepanjang tahun kelihatannya lebih merata pada usaha-usaha tersebut. Bagi rumah tangga hal ini lebih menguntungkan karena pendapatan rumah tangga menjadi lebih tinggi. Usaha perikanan, peternakan, kebun dan pekarangan mengikutsertakan anggota rumah tangga dalam jumlah yang lebih besar. Pada usahatani padi kegiatan paling sibuk adalah pada saat

pengolahan lahan dan panen, sehingga walaupun secara total kebutuhan tenaga dapat dipenuhi oleh rumah tangga, akibat kegiatan yang memuncak pada saat tertentu, petani terpaksa menggunakan tenaga kerja upahan.

Kegiatan di sektor non pertanian ternyata hampir sama pada setiap kelompok rumah tangga. Tidak hanya rumah tangga berlahan kecil yang mencurahkan tenaga di sektor non pertanian, tetapi juga keluarga bertanah luas. Ini merupakan indikasi bahwa pekerjaan di sektor non pertanian bagi rumah tangga pedesaan bukan lagi merupakan pekerjaan sampingan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, tetapi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi pedesaan, yang menghasilkan pendapatan tinggi. Di daerah padi rata-rata pencurahan kerja untuk berburuh di sektor non pertanian hampir sama pada tiap kelompok rumah tangga. Tetapi di daerah sayuran hanya rumah tangga tuna lahan yang berburuh.

Tidak digunakannya tenaga kerja upahan pada kegiatan non pertanian menunjukkan bahwa usaha non pertanian yang dilakukan oleh rumah tangga pedesaan adalah usaha rumah tangga yang umumnya berskala kecil.

Fungsi Ketersediaan Tenaga Kerja

Untuk melihat pengaruh lahan terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga, diduga suatu fungsi penyediaan tenaga kerja. Fungsi ini sebenarnya diturunkan dari fungsi penawaran tenaga kerja keluarga, yang biasanya memerlukan pendugaan secara simultan, karena beberapa peubah endogen merupakan fungsi dari peubah endogen yang lain. Akan tetapi karena data upah tidak tersedia, dan keragaman beberapa peubah memerlukan data menurut urutan waktu, maka yang diduga adalah fungsi ketersediaan tenaga kerja, yang merupakan "reduced form". Di dalam model ini pencurahan tenaga kerja keluarga merupakan fungsi dari hanya peubah eksogen. Luas lahan milik, jumlah anggota keluarga yang sudah mencapai usia kerja, umur dan pendidikan kepala keluarga dihipotesakan sebagai peubah yang mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja keluarga. Untuk mempermudah interpretasi, digunakan fungsi dobel logaritma, sehingga koefisien dapat diartikan sebagai angka elastisitas.

Hasil pendugaan model adalah seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 6. Pada tabel ini terlihat bahwa pengaruh lahan terhadap pencurahan tenaga kerja keluarga di sektor pertanian sangat besar dan

nyata. Di daerah sayuran, setiap peningkatan luas lahan milik sebesar 10 persen, tenaga kerja keluarga yang dicurahkan pada sektor pertanian meningkat sebesar 12 persen. Ini berarti, secara rata-rata luas pemilikan lahan sekarang hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja keluarga yang tersedia. Seperti ditunjukkan dalam tabel, perbedaan koefisien antara desa penghasil sayuran dan ternak dengan desa penghasil padi nyata secara statistik. Di daerah padi pengaruh luas lahan yang dimiliki terhadap peningkatan penggunaan tenaga kerja keluarga lebih kecil, yaitu 0,75 dan 0,51 di dataran rendah dan dataran tinggi. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja per satuan luas yang lebih banyak di daerah sayuran dan ternak dibandingkan dengan daerah padi.

Jumlah anggota keluarga pada usia kerja dan umur kepala keluarga berpengaruh positif dan nyata terhadap ketersediaan tenaga kerja keluarga seperti yang diperkirakan, sedangkan pendidikan kepala keluarga berpengaruh negatif dan nyata. Yang terakhir ini mungkin disebabkan pekerja berpendidikan tinggi tidak banyak melibatkan tenaga keluarganya untuk bekerja, dan lebih banyak mengupahkan kepada orang lain.

Pengaruh luas lahan terhadap penggunaan tenaga kerja di sektor non pertanian juga menunjukkan hal serupa. Pengaruh luas lahan milik terhadap pencurahan tenaga kerja keluarga lebih kecil dibandingkan dengan pada sektor pertanian, yaitu 0,62 di daerah sayuran dan ternak, dan 0,31 dan 0,13 di daerah padi dataran rendah dan dataran tinggi. Perbedaan pencurahan tenaga kerja pada sektor pertanian di daerah non padi dan padi ini sangat menarik. Angka-angka tersebut memberi petunjuk bahwa ketersediaan tenaga kerja untuk sektor non pertanian juga lebih tinggi di daerah sayuran dan ternak dibandingkan dengan di daerah padi. Kelihatannya sistem pertanian yang menghemat lahan seperti peternakan dan kolam, mempunyai daya serap terhadap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan usahatani padi.

Koefisien peubah ini menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang dimiliki, semakin tinggi tenaga kerja keluarga dicurahkan untuk kegiatan non pertanian. Diduga akumulasi modal pada kelompok rumah tangga bertanah luas memungkinkan mereka untuk menginvestasikan modalnya di sektor non pertanian, sehingga polarisasi lahan pertanian dapat pula mengarah pada pelebaran senjang pada sektor non pertanian.

Tabel 6. Koefisien regresi dan t-statistik fungsi ketersediaan tenaga kerja, Jawa Barat, MH 1987/88.

Peubah	Pertanian		Non Pertanian	
	Koefisien	nilai t	Koefisien	nilai t
Konstansta	3,6714	3,190	-1,1940	-0,865
Luas lahan	1,1199	8,667	0,6257	4,039
Jumlah AK	1,4341	5,907	1,1406	3,919
Umur KK	-0,0627	-1,363	0,2311	4,193
Pendidikan KK	-0,5613	-2,377	-0,6495	-2,294
Dat. rendah (D1)	1,2567	1,413	2,707	2,538
Dat. tinggi (D2)	1,078	1,112	-0,2515	-0,216
(Luas lahan).D1	-0,4807	-3,247	-0,3137	-1,767
(Luas lahan).D2	-0,5922	-3,798	-0,4924	-2,634
R ²	0,2433		0,1131	

TINGKAT PENDAPATAN

Perbedaan Menurut Tipe Desa

Seperti halnya pencurahan kerja, struktur pendapatan menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam perekonomian pedesaan. Pendapatan rumah tangga ditunjukkan oleh Tabel 6-8.

Secara keseluruhan pendapatan rumah tangga di daerah sayuran dan ternak lebih tinggi dari pada di daerah padi, yaitu dengan pendapatan di atas Rp 1 juta per musim. Sumbangan terbesar berasal dari sektor pertanian yaitu berkisar antara 45-80 persen pendapatan di daerah padi dataran rendah dan tinggi berkisar antara Rp 372.000-Rp 1.729.000 dan antara Rp 238.000-Rp 1.035.000 per musim. Variasi pendapatan dari sektor pertanian antar musim diperkirakan cukup besar karena sifat tanaman yang peka terhadap musim. Pada musim hujan biasanya produksi padi per hektar lebih tinggi karena cukup air selama proses pertumbuhan tanaman. Sebaliknya untuk tanaman sayuran di daerah dataran tinggi biasanya produksi per hektar lebih rendah pada musim hujan karena tanaman kelembaban tinggi dan kebanyakan air dapat mengakibatkan pembusukan tanaman.

Pendapatan rata-rata rumah tangga dari usahatani padi di dataran tinggi adalah yang terendah, disusul oleh dataran padi di dataran rendah, dan daerah sayuran dan ternak. Kelihatannya daerah sayuran, yang biasanya lebih intensif dalam penggunaan masukan, paling menguntungkan buat petani. Produktivitas lahan di daerah sayuran dan ternak lebih tinggi dari pada di daerah padi. Rata-rata perhektar tanaman sayuran menghasilkan pen-

dapatan buat petani sebesar Rp 1.105.330, sedangkan padi di dataran rendah dan tinggi adalah Rp 820.507 dan Rp 291.923.

Selain itu ternak dan kolam memberikan kontribusi besar pada pendapatan petani di daerah sayuran dan ternak. Di dataran rendah peternakan dan kolam memberikan kontribusi yang sangat rendah, yaitu antara Rp 10.000-Rp 50.000, sedangkan di dataran tinggi adalah Rp 3.000-Rp 160.000. Di daerah ternak sumbangannya sangat besar yaitu Rp 127.000-Rp 777.000, atau 12-32 persen dari pendapatan total. Pendapatan yang tinggi dari kolam dan ternak ini selain karena kedua jenis usaha tersebut produktivitasnya tinggi, juga karena tenaga kerja yang digunakan cukup dengan tenaga kerja keluarga, biaya tunai yang harus dikeluarkan untuk upah buruh rendah.

Secara umum kebun dan pekarangan belum diusahakan secara intensif. Ini terlihat baik dari pencurahan kerja maupun pendapatan yang rendah. Di pedesaan areal pekarangan biasanya cukup luas dan pemanfaatan secara intensif mungkin akan memberikan tambahan pendapatan yang berarti kepada pemiliknya.

Walaupun dalam angka persen pendapatan dari sektor non pertanian di daerah sayuran dan ternak lebih rendah dari pada di daerah padi, tetapi pendapatan dalam rupiah jauh lebih tinggi. Tingginya aktivitas non pertanian di daerah ini tidak terlepas dari kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut yang diduga ada kaitannya dengan jenis komoditi pertanian yang dihasilkan. Pada umumnya komoditi sayuran melibatkan kegiatan perdagangan yang cukup banyak karena sifat komoditinya yang memang untuk dijual.

Tabel 7. Pendapatan rumah tangga dari berbagai kegiatan di pedesaan Jawa Barat berdasarkan luas pemilikan tanah di desa padi dataran rendah, 1987/1988.

Jenis kegiatan	Luas pemilikan tanah (ha)							
	0		0-0.25		0.25-0.50		0.50	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1. Pertanian :								
- Usahatani	112332	30,21	185812	32,29	301901	44,38	693787	40,13
- Peternakan & kolam	11685	3,14	9988	1,74	14665	2,16	50215	2,90
- Kebun & pekarangan	299	0,08	22639	3,93	53270	7,83	102080	5,90
- Berburuh	56460	15,19	44384	7,71	30641	4,50	13747	0,80
2. Non pertanian :								
- Dagang dan Industri	118256	31,81	192124	33,39	149434	21,97	304137	17,59
- Pegawai dan Jasa	58094	15,62	99418	17,28	99332	14,60	316538	18,31
- Berburuh	14688	3,95	16141	2,80	15194	2,23	7755	0,45
- Sewa, Gadai dan lainnya	0	0	4953	0,86	15798	0,32	240526	13,91
Total	371814	100,00	575459	100,00	680234	100,00	1728785	100,00

Tabel 8. Pendapatan rumah tangga dari berbagai sektor di pedesaan Jawa Barat berdasarkan luas pemilikan tanah di desa padi dataran tinggi, 1987/88.

Jenis kegiatan	Luas pemilikan tanah (ha)							
	0		0-0.25		0.25-0.50		0.50	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1. Pertanian	39230	5,42	77867	32,78	157162	46,30	821826	79,38
- Usahatani	19395	7,62	45557	19,18	112111	33,03	285677	27,59
- Peternakan & kolam	3591	1,41	57991	24,41	24427	7,19	160656	15,52
- Kebun & pekarangan	4197	1,65	6139	2,58	19791	5,83	375493	36,27
- Berburuh	12047	4,74	9180	3,86	833	0,25	0	0
2. Non pertanian :	215227	84,58	159702	67,22	182258	53,69	213431	20,61
- Dagang dan Industri	51889	20,39	43100	18,14	116800	34,41	20419	1,97
- Pegawai dan Jasa	123187	48,41	90951	38,28	43458	12,80	164640	15,90
- Berburuh	40151	15,78	25244	10,63	22000	6,48	28372	2,74
- Sewa, Gadai dan lainnya	0	0	407	0,17	0	0	0	0
Total	254457	100,00	237569	100,00	339420	99,00	1035257	99,99

Perbedaan Menurut Luas Lahan Milik

Walaupun luas usahatani pada kelompok I, II dan III tidak banyak berbeda antar daerah, ternyata pendapatan mereka dari sektor pertanian cukup beragam. Pendapatan dari berburuh tani di daerah padi dataran rendah memberikan kontribusi cukup besar pada pendapatan petani, yaitu sekitar 20-30 persen dari pendapatan dari sektor pertanian bagi rumah tangga kelompok I dan II. Kelompok rumah tangga pemilik lahan relatif luas kebanyakan tidak berburuh tani. Di daerah sayuran kelompok rumah tangga tuna lahan memperoleh pendapatan yang tinggi dari usahatani karena banyak usahatani sayuran justru dilakukan oleh bukan petani. Me-

reka menyakap lahan pertanian untuk usaha tersebut dan menggunakan tenaga kerja upahan untuk melaksanakan usahatani tersebut. Pendapatan dari usahatani pada kelompok ini secara rata-rata adalah sekitar Rp 400.000, dengan pencurahan tenaga yang hampir seluruhnya tenaga kerja upahan (Tabel 5 dan 9).

Kalau dibandingkan dengan keadaan pada 15 tahun yang lalu proporsi pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian telah menurun. Tabel 10 menunjukkan perbedaan proporsi pendapatan dari masing-masing sektor antara data BPS tahun 1988, 1975, data Survey Agro Ekonomi dan data Patanas. Ada dua perbedaan yang mendasar dapat ditarik dari data tersebut. Yang pertama, secara keseluruhan-

Tabel 9. Pendapatan rumah tangga dari berbagai sektor di pedesaan Jawa Barat berdasarkan luas pemilikan tanah di desa sayuran/ternak, 1987/1988.

Jenis kegiatan	Luas pemilikan tanah (ha)							
	0		0-0.25		0.25-0.50		0.50	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1. Pertanian	625466	58,65	470798	44,62	2845738	79,87	513696	62,22
- Usahatani	402256	37,72	148735	14,10	2285196	64,14	776505	31,92
- Peternakan & kolam	127493	11,96	291642	27,64	553875	15,54	737191	30,30
- Kebun & pekarangan	4821	0,45	189	0,02	6667	0,19	0	0
- Berburuh	90896	8,52	30232	2,86	0	0	0	0
2. Non pertanian :	441049	41,35	584236	55,38	717339	20,13	919087	37,78
- Dagang dan Industri	133152	12,48	228679	21,68	342667	9,62	508696	20,91
- Pegawai dan Jasa	252718	23,70	355557	33,70	374672	10,51	356261	14,64
- Berburuh	55179	5,17	0	0	0	0	0	0
- Sewa, Gadai dan lainnya	0	0	0	0	0	0	54130	2,23
Total (1 + 2)	1066515	100,00	1055034	100,00	3563077	100,00	2432783	100,00

an persentase pendapatan dari sektor non pertanian meningkat secara konsisten. Pada tahun 1975 kontribusi pertanian terhadap pendapatan total rumah tangga adalah 13 persen di desa Lanjan, yang merupakan contoh desa dataran rendah dengan produksi utama padi, 27 persen di desa Ciwangi, penghasil padi di dataran tinggi, dan 55 persen di Malausma, desa contoh lahan kering. Artinya secara umum telah terjadi perubahan struktur ekonomi pedesaan, di mana sektor non pertanian semakin berperan dan semakin penting sebagai sumber pendapatan rumah tangga.

Yang kedua, dapat diamati dari perubahan peranan sektor non pertanian ini adalah, kelompok pemilik lahan relatif luas di pedesaan semakin berperan dalam sektor non pertanian. Pada tahun 1975 kontribusi sektor non pertanian menurun dengan meningkatnya luas lahan milik, sedangkan data Patanas tahun 1989 menunjukkan bahwa pemilik lahan luas pun memperoleh pendapatan dari sektor non pertanian dalam porsi yang besar. Walaupun demikian, karena contoh desa berbeda, kasus ini tidak dapat ditarik sebagai kesimpulan yang berlaku umum.

Seperti tercantum pada Tabel 7-9, kecuali dari kegiatan berburuh, pendapatan rumah tangga dari setiap kegiatan berkorelasi positif dengan luas lahan milik. Kelihatannya kesempatan pemilik lahan luas lebih besar untuk terlibat dalam berbagai kegiatan non pertanian dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pe-

milik lahan lebih kecil. Diperkirakan perbedaan ini akibat perbedaan tingkat modal yang diinvestasikan dalam usaha non pertanian tersebut.

Fungsi Determinasi Pendapatan

Untuk melihat peranan aset yang dimiliki rumah tangga terhadap pendapatan, diduga melalui fungsi determinasi pendapatan. Dua fungsi yang terpisah dipakai untuk menerangkan pendapatan dari sektor pertanian dan sektor non pertanian. Fungsi ini juga dalam bentuk double logaritma, sama seperti yang digunakan untuk menganalisis ketersediaan tenaga kerja. Hasil pendugaan disajikan pada Tabel 11.

Lahan pertanian merupakan sumber utama yang menentukan tingkat pendapatan dari sektor pertanian. Elastisitas lahan terhadap pendapatan adalah sekitar 1,9, artinya peningkatan luas usahatani sebesar 10 persen, ceteris paribus, akan meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian sebesar 19 persen. Peningkatan pendapatan yang tinggi tersebut, selain disebabkan oleh peningkatan luas lahan juga disebabkan oleh penggunaan tenaga kerja keluarga yang lebih besar. Pengaruh luas lahan pada pendapatan dari sektor non pertanian juga positif dan nyata, dengan koefisien sebesar 1,2. Selain luas lahan, jumlah tenaga kerja keluarga pada usia kerja dan umur petani berpengaruh positif terhadap pendapatan. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa anggota rumah tangga pada usia

kerja, mulai ikut bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan umur kepala keluarga biasanya berkorelasi positif dengan pengalaman kerja dan produktivitas kerja.

Pendapatan dari kegiatan non pertanian ternyata ada kaitan erat dengan luas lahan milik. Diperkirakan ada usaha pemilik lahan mengalokasikan sebagian asetnya di sektor non pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan. Seperti ditunjukkan pada Tabel 11, pengaruh penguasaan aset lahan terhadap pendapatan dari sektor non pertanian ini cukup besar. Elastisitas lahan adalah 0,76 di daerah sayuran dan ternak. Perbedaan koefisien antar tipe desa nyata, menunjukkan pengaruh lahan ini lebih kecil di daerah padi dari pada di daerah sayuran dan ternak. Pengaruh jumlah anggota keluarga usia kerja lagi-lagi positif dan nyata, sedangkan pendidikan negatif.

Tabel 10. Pangsa pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian dan non pertanian di Pedesaan Jawa, menurut beberapa sumber data, 1975 dan 1988.

Sumber data	Pertanian Non pertanian	
Studi Dinamika Pedesaan (1975) ¹⁾ :		
Lanja (dataran rendah)	87,5	12,5
Ciwangi (dataran tinggi)	76,3	23,7
Malasma (lahan kering) (palawija dan kerajinan)	45,1	54,9
Patanas (1984/85) ²⁾ :		
Dataran rendah	60,4	39,6
Lahan kering	73,4	26,6
Daerah tambak	58,1	41,9
Patanas (1987/88) :		
Dataran rendah	50,7	49,3
Dataran tinggi	43,4	56,5
Lahan kering (sayuran dan ternak)	61,3	38,7

¹⁾ Gunawan dkk. (1977)

²⁾ Nurmanaf dan Nasution (1985).

Tabel 11. Koefisien regresi dan t-statistik fungsi determinasi pendapatan, Jawa Barat, MH 1987/88.

Peubah	Pertanian		Non Pertanian	
	Koefisien	nilai t	Koefisien	nilai t
Konstansta	11,0064	7,013	3,6261	1,922
Luas lahan	1,9116	10,811	1,2110	5,297
Jumlah AK	1,6270	4,999	1,3465	3,383
Umur KK	0,0508	0,823	0,3338	4,429
Pendidikan KK	-0,5670	-1,793	-0,7111	-1,837
Dat. rendah (D1)	1,9183	1,2235	3,2964	2,260
Dat. tinggi (D2)	1,6510	1,240	.	.
(Luas lahan).D1	-0,7809	-3,874	-0,4508	-1,837
(Luas lahan).D2	-0,7731	-3,636	-0,7331	-2,868
R ²	0,3446		0,1371	

KESIMPULAN

Uraian di atas menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penguasaan lahan pertanian semakin menceng sehingga usaha non pertanian akan semakin penting bagi penduduk yang tuna lahan di Pedesaan. Angkatan kerja baru mungkin akan sebagian terserap ke sektor pertanian, tetapi di Jawa tambahan tenaga kerja ini tidak meningkatkan produktivitas lahan. Kemencengan penguasaan lahan dipengaruhi juga oleh pola pertanian yang ada. Seperti ditunjukkan bahwa pola padi sebaran penguasaan lahannya relatif

lebih baik dari pada di lahan kering.

2. Pada saat ini pencurahan kerja di sektor pertanian tidak saja dilakukan oleh rumah tangga tuna lahan, tetapi juga oleh rumah tangga pemilik lahan, termasuk pemilik lahan luas. Sektor non pertanian merupakan aktivitas perekonomian yang semakin penting di pedesaan, bahkan dari segi pencurahan kerja maupun pendapatan sudah lebih tinggi daripada pertanian. Program pembangunan pertanian sudah seharusnya menempatkan sektor non pertanian dalam prioritas yang lebih tinggi. Selain itu karena keterampilan pekerja di pedesaan lebih banyak pada pertanian, program penyuluhan dan pendidikan harus mengarah pada sektor non pertanian.

3. Akumulasi aset yang kemudian diinvestasikan di sektor non pertanian diduga terjadi, sehingga struktur penguasaan modal di sektor non pertanian akan juga dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai aset di sektor pertanian. Peranan lembaga perkreditan harus lebih ditingkatkan untuk memperbaiki distribusi modal di sektor pertanian maupun non pertanian.
4. Pola pertanian hemat lahan seperti kolam, ternak, belum dikembangkan dengan baik. Melihat pencurahan tenaga kerja dan pendapatan di daerah ternak, kelihatannya usaha ternak dan kolam ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja keluarga dan pendapatan. Kontribusi ternak dan kolam sangat kecil di daerah padi. Mungkin karena penggunaan insektisida dalam dosis tinggi mengakibatkan usaha ternak dan ikan semakin berkurang akibat seringnya kasus keracunan oleh insektisida. Sesuai dengan upaya perbaikan gizi, pola usaha ini perlu mendapat perhatian, karena selain tidak diperlukan biaya tunai untuk membayar tenaga upahan, juga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Seiring dengan maksud di atas, pemanfaatan pekarangan juga

perlu mendapat perhatian, agar pekarangan dapat diusahakan lebih intensif dengan tanaman yang berguna baik untuk konsumsi keluarga ataupun untuk dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Memed; dkk. 1977. Penyediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian. Laporan No. 14/77/L. Studi Dinamika Pedesaan, SAE, Bogor.
- Gunawan, Memed, A.R. Nurmanaf dan M. Husein Sawit, 1979. Penyediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian. Analisa Pencurahan Tenaga kerja Rumah tangga dan Individu di Pedesaan DAS Cimanuk, Jawa Barat. Proyek SDP-SAE Bekerjasama dengan Biro Perencanaan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Nurmanaf, Rozany dan Aladin Nasution. 1986. Ragam Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Timur. *Dalam: Struktur Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga Pedesaan di Jawa Timur*. Faisal Kasryno dkk (eds). Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Saleh, Chairul; dkk. 1988. Dampak Program Pembangunan Pertanian Terhadap Tenaga Kerja, Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan Jawa Barat. Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.